

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Muhammadiyah merupakan salah satu FBO yang ikut andil dalam penyelesaian kasus persekusi Uighur. FBO tersebut berperan dalam agenda *Faith-Based Diplomacy* yang dilaksanakan tahun 2018-2020. Namun, diplomasi tersebut tidak berjalan dengan tuntas. Diketahui Muhammadiyah hanya mampu melaksanakan tahap pertama diplomasi, yakni *Offering A New Vision* yang berorientasi pada penghapusan kebijakan represif, pembaharuan cara pandang terhadap muslim dengan isu separatisme, dan kolaborasi *stakeholder* yang lebih luas. Dengan makna lain, mereka belum dapat merealisasikan agenda *Building Bridges, Mediation, dan Healing the Wound of History* yang memiliki peluang untuk menjadi media advokasi kebijakan publik, membangun “*positive trust*” di masyarakat, mengatasi kesenjangan akibat konflik, dan menjadi media fasilitatif untuk inisiasi rekonsiliasi konflik.

Penyebab Muhammadiyah belum tuntas merealisasikan tahap-tahap *Faith-Based Diplomacy* adalah pengaruh minimnya *Political Will* pemerintah China. Berdasarkan hasil analisis penulis mengenai kondisi dan sikap pemerintah China dengan enam indikator *Political Will* menurut Brinkerhoff (2007), pemerintah China hanya menunjukkan sikap positif saat mereka menyalurkan inisiatif dan pengalokasian sumber daya kepada Muhammadiyah dalam agenda kunjungan ke Beijing, Urumqi, dan Xinjiang pada tahun 2019. Namun, dalam konteks prioritas

yang ditinjau dari *Chinese Dream*; *The 13th Five-Year Plan for Economics and Social Development*; *The 14th Five-Year Plan (2021-2025) for National Economic and Social Development and Vision 2035 of the People's Republic of China*; *The 19th National Congress of the Communist Party of China*; dan interpretasi pidato Xi Jinping, China belum memprioritaskan aspirasi Muhammadiyah terkait kasus persekusi Uighur. Disisi lain, terdapat kendala *Political System* China yang menimbulkan mobilisasi *stakeholder* berjalan kurang baik. Pemerintah China juga diketahui tidak melakukan keberlanjutan usaha dan evaluasi kebijakan represif yang disampaikan Muhammadiyah selama kunjungan tahun 2019. Dengan keterbatasan akses untuk melakukan intervensi HAM dalam agenda *Building Bridges*, *Mediation*, dan *Healing the Wound of History* di atas, proses diplomasi kemudian berhenti pada penawaran delapan visi kemanusiaan saja.

4.2. Saran

Penelitian ini memiliki potensi pengembangan riset mengenai analisis pembaharuan strategi diplomasi FBO dalam mengatasi kendala minimnya *Political Will*. Hal ini penting untuk realisasi *Faith-Based Diplomacy* yang komprehensif di tengah kompleksitas kendala minimnya kemauan politik negara penerima. Penelitian selanjutnya dapat lebih rinci menganalisis langkah strategis dan inovatif seperti apa yang mampu secara intens meningkatkan aksesibilitas FBO dalam berdiplomasi, sehingga setiap indikator kemauan politik dapat terlaksana secara merata. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan penelitian berikutnya untuk memperdalam analisis penentuan dan pertimbangan FBO sebelum melakukan diplomasi. Melalui pengembangan riset tersebut diharapkan mampu

meningkatkan peluang FBO secara lebih efektif dalam menyelesaikan kejahatan persekusi dalam HI yang masih terjadi hingga saat ini.